

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	(Febrianti et al., 2022). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru	Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari tingkat rumah tangga banyak yang masih membuang membakarnya sendiri. sampah walaupun dengan telah dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah namun masih banyak masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah.	Teori yang digunakan yaitu teori partisipasi masyarakat dari Koentjaraningrat (1991). Serta teori bentuk partisipasi masyarakat dari Sastoepotro Lokus penelitian berada di Kota Pekanbaru.
2	(Setyawati & Priyo Siswanto, 2020). Partisipasi Perempuan Dalam	Diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif dalam mengelola sampah mereka, hal ini dapat dimulai dari rumah tangga yakni dengan cara	Fokus penelitian terhadap partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah yang Menekankan

	<p>Pengelolaan Sampah Yang Bernilai Ekonomi Dan Berbasis Kearifan Lokal</p>	<p>melakukan pemilahan sampah organik, sampah anorganik sehingga dengan sudah berkurangnya sampah karena sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka yang terangkut ke TPA hanya sebagian kecil saja</p>	<p>pentingnya pengelolaan sampah makanan sebagai isu global dan memberikan rekomendasi berdasarkan praktik terbaik dari negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Menggunakan pendekatan kearifan lokal dan teori perilaku Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bantul.</p>
3	<p>(Amrulloh et al., 2025). Partisipasi Masyarakat Urban dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Induk Kota Magelang Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah. Ditemukan bahwa masyarakat yang sudah terlibat merasakan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi, meskipun insentif ekonomi masih dirasa belum signifikan.</p>	<p>Fokus pada Bank Sampah Induk Kota Magelang sebagai Solusi pengelolaan sampah berbasis Masyarakat perkotaan. Menganalisis factor pendorong dan penghambat partisipasi untuk mendukung</p>

			Pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan teori Davis (2010).
4	Ni Made Nia Bunga (2021). Kajian Partisipasi Masyarakat Dusun Bone Puteh Dalam Pengelolaan Sampah	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah program di lingkungan Dusun Bone Puteh masih terkendala pada tahap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah karena masyarakat masih berpikir bahwa harus ada yang besar untuk melakukan program pengolahan sampah yang bersifat terpusat di satu titik pada lingkungan Dusun Bone Puteh.	Menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sastropetro dan teori pendekatan pengembangan masyarakat.
5	Septian Hadi, I Putu Gede, I Wayan Suteja (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Untuk	Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dikawasan Pantai Sira bersifat swakarsa dimana masyarakat ikut berpartisipasi secara swakarsa tanpa adanya dorongan atau pengaruh	Fokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan Zero Waste Destination. Selain menggunakan teori

	Mewujudkan Zero Waste Destination	dari orang lain. Partisipasi masyarakat tanpa adanya dorongan dari orang lain, seperti masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk materi yaitu membeli tong sampah secara swadaya dan adapun partisipasi dalam bentuk fisik yaitu masyarakat ikut bergotong royong membersihkan kawasan Pantai Sira.	partisipasi masyarakat, penelitian ini juga menggunakan teori pendekatan manajemen. Lokasi penelitian dilakukan di Pantai Sira, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.
--	-----------------------------------	---	---

B. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa Latin "*ad*" dan "*ministrare*", yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi kebutuhan. Dari kata Latin ini juga berasal kata sifat "*administrativus*" dan kata benda Inggris "*administration*" (Hadari) dalam (Wakhid, 2016:1). Administrasi Publik menurut Nicholas Henry dalam (Pasolong, 2019:8) merupakan satu gabungan yang kompleks antara teori dan praktik, yang tujuannya untuk mempromosi pemahaman antara hubungan pemerintah dengan masyarakat yang diperintahnya, selain sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat administrasi publik juga bertujuan untuk mendorong kebijakan publik agar lebih peka dan paham akan kebutuhan sosial. Administrasi publik terus berupaya menyempurnakan mekanisme manajemen yang lebih responsif, efisien dan berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam (Pasolong, 2019:8) administrasi publik sebagai proses pengorganisasian dan

pengelolaan personel dan sumber daya publik. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa administrasi publik merupakan sintesis seni dan sains dengan tujuan mengelola urusan publik dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Disiplin ilmu administrasi publik berfokus pada pengembangan dan peningkatan solusi untuk permasalahan sosial, terutama di bidang keuangan, sumber daya manusia, dan organisasi. Politik, birokrasi, dan elemen-elemen manajemen kebijakan semuanya terkait dengan administrasi publik.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses kerja sama yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan guna menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat. Perencanaan, implementasi kebijakan, dan tugas-tugas lain yang melibatkan kerja sama antara lembaga pemerintah, sektor komersial, dan masyarakat sipil, semuanya termasuk dalam kategori luas administrasi publik. Metode ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat umum dengan mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, di samping efisiensi dalam penerapan kebijakan. Oleh karena itu, untuk mencapai tata kelola yang responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan, administrasi publik menjadi sangat penting secara strategis.

2. Peran Administrasi Publik

Paul H. Appleby dalam (Maksudi, 2018:235) “administrasi adalah dasar dari pemerintah. Tidak ada pemerintah bisa eksis tanpa administrasi. Tanpa administrasi pemerintahan akan menjadi klub diskusi, jika memang itu bisa ada sama sekali.” Selain itu, peran administrasi publik di berbagai aspek yang tertera dibawah ini:

a. Dasar pemerintah

Sebuah pemerintah tidak bisa eksis tanpa legislatif atau pengadilan yang independen. Tapi pemerintah tidak bisa eksis tanpa administrasi.

b. Alat untuk menyediakan layanan

Administrasi publik terutama berkaitan dengan kinerja berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

c. Alat untuk menerapkan kebijakan

Pemerintah modern pergi jauh dalam merumuskan dan mengadopsi hukum kebijakan yang sehat dan peraturan. Ini tidak boleh dilupakan bahwa kebijakan tersebut, hukum, dan lain-lain tidak hanya dicetak kertas, deklarasi kertas seperti niat, dijabarkan menjadi kenyataan dengan administrasi publik sehingga mengubah kata-kata ke dalam tindakan dan bentuk menjadi zat.

d. Sebuah Kekuatan Penyeimbang di Masyarakat

Administrasi publik adalah kekuatan utama untuk membawa stabilitas di masyarakat. Ia telah mengamati bahwa meskipun pemerintah sering berubah, tapi perubahan kekerasan jarang dialami oleh administrasi. Sebuah elemen kontinuitas antara yang lama dan pesanan baru disediakan oleh administrasi publik. Ini tidak berlaku hanya perubahan konstitusional pemerintah di negara-negara demokratis, tetapi juga tercermin ketika ada perubahan revolusioner dalam bentuk dan karakter dari pemerintah.

e. Sebuah Alat Perubahan Sosial dan Pembangunan Ekonomi

Peran Administrasi publik sebagai agen perubahan sangat penting di negara berkembang. Diharapkan negara saat ini bekerja untuk mempercepat perubahan sosial-ekonomi, bukan menjadi agen pasif untuk mempertahankan status quo.

f. Karakter Teknis

Pemerintah hari ini diharapkan dapat memberikan berbagai layanan kepada penduduknya. Peningkatan jumlah fungsi yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan layanan yang sangat khusus, profesional dan teknis, administrasi publik modern biasanya merupakan galaksi semua pekerjaan suatu negara.

C. Organisasi Publik

1. Pengertian organisasi publik

Dalam administrasi public, organisasi publik berawal dari konsep 'barang publik' (*public goods*, yang merupakan adanya prosuk-produk tertentu baik itu berupa barang atau jasa yang tidak bisa dipenuhi dengan mekanisem pasar yang dilakukan oleh berbagai individu (Samuelson, 1945) dalam (Kusdi, 2018:41). Dalam pengertian umum organisasi publik atau sering digunakan istilah organisasi sektor publik adalah organisasi yang memperoleh mandat dari pemerintah, dibiayai oleh pemerintah serta mempunyai misi yang harus dipenuhi yang biasanya berasal dari pemimpin politik terpilih (Freddriksson and Pallas 2011) dalam LAN. Menurut Organisasi Publik adalah sebuah organisasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengarpakan atau berorientasi pada pencapaian keuntungan. (buku merah).

2. Ciri-ciri Organisasi Publik

Steward dalam (Kusdi, 2018:44) menyebutkan bahwa tidak kurang dari 13 ciri organisasi public:

1. Target atau sasaran yang tidak bias terdefinisi secara jelas.
2. Harapan-harapan yang beragam dan acapkali bersifat artifisial atau polis.
3. Tuntutan dari berbagai pihak yang berbeda.
4. Tuntutan dari badan-badan yang mengucurkan anggaran baik pemerintah pusat atau badan lainnya di tingkat nasional.
5. Penerima jasa, yaitu masyarakat tidak memberikan kontribusi secara langsung melainkan melalui mekanisme pajak.
6. Sumber anggaran berbeda-beda.
7. Anggaran yang diterima mendahului pelayanan yang diberikan.
8. Ada pengaruh dari perubahan politik.
9. Tuntunan dan arahan yang harus dipatuhi dari pusat.
10. Batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

11. Larangan atau pembatasan untuk melakukan usaha-usaha yang menghasilkan laba.
12. Larangan atau pembatasan untuk menggunakan anggaran di luar tujuan yang secara formal ditetapkan.
13. Tingkat sensitivitas terhadap tekanan kelompok masyarakat.

3. Kategori organisasi publik

Organisasi publik tentu memiliki beberapa kategori di dalamnya, menurut Sorensen dalam (Kusdi, 2018:46), organisasi publik memiliki empat kategori. Keduanya dibedakan berdasarkan dua hal, yang pertama tingkat kejelasan dan keterukuran sasaran yang ingin dicapai dan yang kedua, sejauh mana hubungan sebab-akibat dalam proses operasional organisasi dapat diketahui. Kemudian melalui dua kriteria tersebut, dapat menghasilkan empat kategori dari organisasi publik, sebagai berikut:

1. Kategori A

Pada kategori A yakni berbagai organisasi publik yang mempunyai berbagai tujuan yang terdefinisi secara jelas serta hubungan sebab-akibat yang diketahui dengan pasti pada saat memproduksi *public goods* yang ditugaskan kepadanya. Tipe organisasi seperti ini biasanya ditemukan pada perusahaan milik negara. Pada kategori ini bisa menerapkan ukuran-ukuran kinerja secara ekonomis untuk menilai apakah organisasi publik ini sudah dikelola secara baik atau belum.

2. Kategori B

Pada organisasi publik kategori B merupakan organisasi publik yang di mana tujuan-tujuan yang harus dicapai cukup jelas, tetapi hubungan sebab-akibat dalam proses operasionalnya tidak diketahui secara pasti. Untuk organisasi publik jenis ini, tidak dapat menerapkan ukuran-ukuran kinerja yang semata-mata bersifat ekonomis. Tetapi penilaian kinerjanya dilakukan melalui pendapat para ahli (*judgmental*). Contoh organisasi yang termasuk pada kategori B adalah organisasi-organisasi publik yang menangani masalah pendidikan.

3. Kategori C

Pada organisasi publik kategori C merupakan organisasi publik yang di mana tujuan organisasi tidak secara jelas bisa didefinisikan dikarenakan banyak *stakeholders* yang terlibat, tetapi pada kategori ini hubungan sebab-akibat dalam kegiatan operasional organisasinya bisa ditentukan secara pasti. Organisasi yang termasuk pada kategori C yaitu rumah sakit milik pemerintah, perpajakan serta bea cukai dan lain sebagainya.

4. Kategori D

Pada organisasi publik kategori D adalah organisasi publik yang di mana baik tujuan-tujuan organisasi maupun hubungan sebab-akibat operasionalnya tidak bisa ditentukan secara jelas. Organisasi yang termasuk pada kategori D ini tercakup pada badan-badan pemerintah seperti kepolisian dan tentara. Untuk tipe ini, tidak dapat menerapkan ukuran ekonomis ataupun *judgmenta*, melainkan legitimasi kelembagaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka organisasi publik adalah entitas yang dibentuk oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, beroperasi dalam kerangka hukum dan regulasi, serta memiliki tanggung jawab untuk akuntabilitas dan transparansi. Fokus utama organisasi publik adalah pada pelayanan masyarakat dan pencapaian tujuan sosial, bukan pada keuntungan finansial. Organisasi publik harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

D. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Pengertian partisipasi secara umum adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan. Sementara itu, Bonby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2011:50), Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan

yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Verhangen dalam (Sangihe, n.d.) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- a. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki.
- b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
- c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

2. Dimensi Partisipasi

Cohen dan Uphoff dalam (Dwiningrum, 2015) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif untuk menuju kata sepakat terkait berbagai ide yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi pada tahap ini sangat penting karena masyarakat menuntut untuk ikut andil dalam menentukan tujuan kedepannya. Bentuk partisipasi pada tahap ini yaitu, diskusi dan kehadiran rapat.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi dalam pelaksanaan adalah kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan tujuan. Pada pelaksanaan diperlukan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah. Ruang lingkup pada tahap partisipasi dalam pelaksanaan ini meliputi sumber daya, kegiatan administrasi dan keterlibatan dalam program pemerintah.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat hasil

Partisipasi dalam pengambilan manfaat hasil tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan yang dapat dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan ditandai dengan adanya peningkatan output dan dari segi kuantitas dilihat dari seberapa besar prosentase keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan secara keseluruhan. Tujuan partisipasi pada tahap ini adalah untuk memastikan apakah pelaksanaan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan atau terdapat kesalahan. Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam evaluasi dan pengambilan keputusan lebih penting bagi politisi dan ilmuwan. Di sisi lain, administrator sering menekankan keterlibatan dalam pembagian manfaat sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tipe Partisipasi

Tipe partisipasi dapat diartikan sebagai tingkat partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Menurut Prety, J (1995) dalam (Tanuwijaya, 2016) partisipasi terbagi menjadi tujuh tipe berdasarkan karakteristiknya, sebagai berikut:

1. Partisipasi pasif atau manipulatif

Masyarakat hanya berperan menjadi penerima info dari sesuatu hal yang terjadi. Informasi tergolong hanya satu arah saja serta tidak mementingkan tanggapan masyarakat sebagai sasaran utama program. Informasi terbatas hanya untuk orang-orang tertentu. Partisipasi ini merupakan bentuk yang sangat lemah.

2. Partisipasi informatif

Masyarakat hanya dijadikan sebagai penerima informasi saja tetapi tidak terlibat langsung dalam hal keputusan maupun setiap program partisipasi yang ada.

3. Partisipasi konsultatif

Dalam partisipasi ini masyarakat dapat berkonsultasi tetapi belum dapat memiliki peluang untuk dapat merencanakan keputusan dengan bersama-sama.

4. Partisipasi insentif

Masyarakat mengharapkan imbalan berupa upah dari hasil pengorbanan jasa mereka. Masyarakat akan berhenti berpartisipasi dalam kegiatan jika insentif ini diberhentikan.

5. Partisipasi fungsional

Pada tahap ini masyarakat membuat kelompok untuk bekerjasama dan setelah hasil keputusan yang sudah disepakati itu sudah keluar mereka masih perlu bimbingan dari pihak luar, tetapi seiring dengan berjalannya waktu maka mereka akan mandiri.

6. Partisipasi interaktif

Pada tahap ini masyarakat ikut serta dalam proses perencanaan kegiatan, masyarakat mempunyai peran untuk mengontrol hasil pelaksanaan dan ikut terlibat pada semua kegiatan.

7. Mandiri

Masyarakat bisa mengemukakan ide secara bebas tanpa ada pengaruh dari pihak luar untuk dapat mengubah sistem atau kegiatan yang akan dijalankan.

4. Bentuk Partisipasi

Menurut Notoatmodjo dalam (Hutagalung, 2022) setiap masyarakat harus berkontribusi agar dapat berpartisipasi. Sumbangan ini juga dapat berupa ide dan tenaga. 4M *manpower* (tenaga), *money* (uang), material (barang lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan *mind*

(ide atau konsep). Beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

5. Faktor Pengaruh Partisipasi

Menurut Najib dalam (Huraerah, 2008) mengatakan terdapat beberapa faktor keberhasilan yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menjadi pencetus partisipasi, bisa dari pihak pemerintahan dan bukan pemerintahan.
2. Partisipasi dilaksanakan untuk kepentingan siapa, tujuannya apakah untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan pemerintah.
3. Siapa yang berpengaruh dan memegang kendali, jika yang memegang adalah pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat bisa dikatakan dapat berhasil karena mereka mengetahui kondisi permasalahan dan kebutuhan masyarakatnya.
4. Keterkaitan pemerintah dan masyarakat, jika rasa kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah baik maka proses dari partisipasi akan dapat mudah dijalankan.
5. Budaya, masyarakat yang masih mengedepankan kebiasaan pengambilan keputusan dengan musyawarah dinilai dapat berlanjut.
6. Politik, sistem politik pemerintahan menganut demokratis, transparan dan menghargai perbedaan.
7. Legalitas, adanya regulasi yang menjamin mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatannya.

8. Ekonomi, ketersediaan jalan untuk masyarakat miskin agar dapat terlibat dalam partisipasi dan menerima hasil langsung ataupun tidak langsung dari keikutsertaan mereka.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, partisipasi didasarkan pada keterlibatan individu. Hal ini akan menghasilkan tanggung jawab dan kontribusi yang besar dalam kelompok. Dalam konteks ini, partisipasi tidak hanya mencakup keikutsertaan dalam kegiatan, tetapi juga kontribusi yang beragam, seperti tenaga, dana, material, dan ide. Proses partisipasi melibatkan pengidentifikasian masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan solusi, dan evaluasi hasil.

E. Pengelolaan Sampah Perkotaan

1. Pengertian Sampah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Budaya konsumtif mendorong orang untuk membeli lebih dari yang dibutuhkan, menggunakan kemasan sekali pakai secara berlebihan, dan membuang barang yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Semua ini adalah bentuk mubadzir yang berkontribusi pada peningkatan volume sampah. Sampah sisa kegiatan manusia wajib dilakukan pengelolaan sampah, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan.

2. Pengertian Pengelolaan Sampah

Definisi pengelolaan sampah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Prof. Dr. John Smith dalam (Rachman, Ranno. Fathur R et.all 2024:2) pengelolaan sampah perkotaan merupakan rangkaian proses yang terdiri dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah yang bersumber dari penduduk perkotaan. Hal ini meliputi segala kegiatan

dan tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah perkotaan melibatkan perencanaan juga implementasi kebijakan dan berbagai program untuk mengurangi, mendaur ulang juga memanfaatkan kembali sampah. Termasuk di dalamnya mencakup tentang penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan.

3. Tujuan Pengelolaan Sampah

Tujuan pengelolaan sampah adalah menjadikan kota bersih, sehat, dan berkelanjutan. Tujuan ini juga mencakup sejumlah tujuan, termasuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), mengelola sampah secara efektif dan efisien, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, mematuhi peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah, dan membangun infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah. Agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sampah, maka dibutuhkan partisipasi aktif serta kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (Usman dkk., 2021) dalam (Rachman, Ranno. Fathur R et.all 2024:17). Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Jika pengelolaan sampah tidak tepat, maka akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan akan berisiko terhadap Kesehatan manusia. Dalam islam pembahasan mengenai kerusakan lingkungan ini tercantum pada Q.S. Ar-Rum (30:41), yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"

4. Proses Pengelolaan Sampah

Menurut Aleluia & Ferrao dalam (Rachman, Ranno. Fathur R, et .all 2024:4) proses pengelolaan sampah perkotaan ini melibatkan beberapa proses sebagai berikut:

1. Pengurangan Sampah

Melalui efisiensi dan penggunaan kembali, hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.

2. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah di sumbernya merupakan bagian dari proses ini.

3. Pengangkutan Sampah

Sampah dipindahkan dari lokasi pengumpulan ke lokasi pemrosesan melalui prosedur ini.

4. Pengolahan Sampah

Dengan menjalani prosedur ini, sampah diubah menjadi bentuk yang lebih berharga, aman, dan mudah dibuang.

5. Pembuangan Sampah Akhir

Prosedur ini merupakan tahap terakhir dari pengelolaan sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat pembuangan sampah yang tidak dapat diolah atau didaur ulang.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah bukan sepenuhnya tanggung jawab otoritas yang berwenang, melainkan kewajiban bersama, termasuk masyarakat. Mengurangi timbulan sampah, memilah sampah, dan berpartisipasi dalam program daur ulang merupakan langkah awal yang dapat dilakukan setiap individu untuk membantu mengelola sampah. Kerja sama para pemangku kepentingan sangat penting untuk mengembangkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

F. Proposisi

Proposisi penelitian ini adalah partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat Tumaritis dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Impun dilihat dari dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi KSM Tumaritis dalam keempat dimensi partisipasi, maka semakin efektif pula pengelolaan sampah yang dilaksanakan. Hal ini tidak hanya berdampak pada keberhasilan teknis dalam mengurangi jumlah timbulan sampah, tetapi juga

memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar.

